



Decentralization as an Effort to Bring Public Services Closer to the Community: A Literature Review on Its Effectiveness

Muhammad Afdhal Arrazak¹, Aldri Frinaldi², Lince Magriasti³, Hendra Naldi⁴ *

Muhammadafdhalarrazak@gmail.com

^{1,2,3,4}Program Studi S2 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

This study aims to understand the extent to which decentralization can bring government services closer to the public through the authority granted to regions. This study uses a literature review method by reviewing various scientific articles discussing decentralization and local government practices. The analysis shows that authority at the regional level provides opportunities for services to be more accessible because decisions can be made more quickly, flexibly, and more appropriately to regional conditions. Its effectiveness is evident through various adjustments made by regional governments, ranging from improving governance, restructuring administrative procedures, to managing resources that support service delivery. However, this success is still influenced by the readiness of regions to manage their authority and their ability to directly understand community needs. Overall, decentralization provides a strong foundation for creating closer and more relevant services for citizens when regional governments are able to optimally utilize the spatial authority granted.

Keywords: Decentralization, Regional Government, Public Services, Service Effectiveness.

PENDAHULUAN

Desentralisasi telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama sejak kewenangan pemerintah daerah diperluas untuk menangani berbagai urusan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pelimpahan kewenangan ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih terlibat dalam pengelolaan urusan yang sebelumnya sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Dengan skema tersebut, daerah memiliki ruang untuk berperan aktif dalam mengatur kebutuhan warganya sesuai dengan kondisi sosial dan geografis masing-masing (Mamma, 2016; Nasution, 2017; Trisakti & Djajasinga, 2021).

Perubahan pola hubungan antara pusat dan daerah membuka kesempatan bagi pemerintah lokal untuk membangun sistem pelayanan yang lebih responsif. Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat memberi keuntungan tersendiri karena daerah dapat lebih memahami dinamika lokal. Pemahaman ini menjadi titik awal dalam membangun pelayanan yang selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah daerah memiliki peluang untuk menyesuaikan langkah-langkah pelayanan agar lebih mudah dijangkau oleh warganya (Antlöv et al., 2016; Bano & Dyonisius, 2022; Salim & Drenth, 2020; Setiawan et al., 2022).

Proses desentralisasi juga memunculkan kebutuhan bagi daerah untuk memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan yang lebih luas diharapkan daerah untuk menata kembali cara kerja, memperjelas pembagian tugas, dan memastikan bahwa aparatur memiliki kemampuan yang memadai. Langkah-langkah tersebut tidak hanya penting bagi kelancaran administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi tidak hanya mengalihkan kewenangan, tetapi juga menuntut adanya kesiapan kelembagaan (Setiawan et al., 2022; Suparjana & Suparjana, 2019).

Dalam praktiknya, efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada bagaimana daerah memanfaatkan ruang yang diberikan. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, sehingga proses pelaksanaannya tidak selalu berjalan seragam. Sebagian daerah dapat bergerak cepat dalam menata diri, sementara daerah lain memerlukan waktu lebih lama. Variasi ini menunjukkan bahwa desentralisasi merupakan proses yang berkembang secara bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi lokal masing-masing (Anantanatorn et al., 2025; Lele, 2019; Shoosmith et al., 2020; Sukodoyo et al., 2025).

Walaupun demikian, tujuan dari desentralisasi tetap berkaitan dengan bagaimana layanan publik dapat lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang berada di tingkat lokal, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan warganya. Kondisi ini memberi peluang bagi layanan pemerintahan untuk menjadi lebih relevan dan mudah dijangkau, terutama ketika daerah mampu memanfaatkan kewenangan secara efektif dan terarah (Ibrahim, 2024; Rohim, 2024; Trisakti & Djajasinga, 2021).

Melihat berbagai dinamika tersebut, penting untuk memahami bagaimana desentralisasi bekerja dan sejauh mana pelaksanaannya berpengaruh terhadap kedekatan layanan dengan masyarakat. Pengetahuan mengenai proses ini dapat membantu memahami peran pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan sehari-hari, sekaligus memberi gambaran tentang tantangan yang mungkin muncul dalam penguatan pemerintahan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan berfokus pada artikel-artikel ilmiah yang membahas desentralisasi dan pemerintahan daerah. Sumber-sumber tersebut ditelusuri melalui berbagai publikasi akademik yang relevan, kemudian digunakan sebagai dasar untuk memahami konsep serta perkembangan desentralisasi dalam konteks pemerintahan lokal. Informasi yang diperoleh dari artikel-artikel tersebut dimanfaatkan untuk melihat bagaimana gagasan mengenai pembagian kewenangan dan penyelenggaraan layanan publik dibahas dalam literatur, sehingga memberikan landasan yang memadai untuk menguraikan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan warganya. Ketika kewenangan tidak lagi terpusat sepenuhnya, proses administrasi di tingkat lokal dapat berjalan lebih sederhana karena tidak harus melalui jalur yang panjang. Kondisi ini membuka peluang bagi layanan pemerintahan menjadi lebih mudah dijangkau masyarakat, terutama dalam urusan yang membutuhkan tanggapan langsung dari pihak yang memahami kondisi wilayah. Dalam konteks ini, desentralisasi menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan layanan melalui kewenangan yang berada lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga (Elliott, 2023; Faguet, 2001; Ibrahim, 2024; Ramadhan & Yusuf, 2025).

Efektivitas desentralisasi dapat terlihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan kewenangan yang diberikan untuk memperbaiki cara mereka bekerja. Banyak daerah menata ulang struktur organisasi, menyesuaikan prosedur administrasi, dan memperkuat koordinasi internal demi mendukung kelancaran layanan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang lebih luas mendorong daerah untuk menjadi lebih adaptif. Meski tidak semua daerah berjalan dengan kecepatan yang sama, kecenderungan untuk memperbaiki pola kerja menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan lokal (Grygorii Monastyrskyi, 2025; Ibrahim, 2024; Setiawan et al., 2022; Sudrajat et al., 2025).

Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat membuat mereka lebih mudah mengenali kebutuhan, kebiasaan, dan karakteristik wilayah yang dilayani. Pemahaman tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah pelayanan yang lebih tepat. Misalnya, penyesuaian jam layanan, penyediaan titik layanan baru, atau penyederhanaan tata cara administrasi. Walaupun bentuknya berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing daerah, langkah-langkah seperti ini menunjukkan bahwa layanan dapat dibuat lebih relevan ketika pengelolanya memahami konteks lokal secara langsung (Bevilacqua et al., 2022; Cilliers et al., 2024; Dick-Sagoe et al., 2021; Felmingham et al., 2023).

Pelimpahan kewenangan juga menciptakan ruang bagi daerah untuk mencoba pendekatan pelayanan yang lebih fleksibel. Keputusan tidak harus selalu menunggu instruksi dari tingkat pusat sehingga daerah dapat menyesuaikan kebijakan dengan situasi yang sedang berlangsung. Fleksibilitas ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan, karena pemerintah daerah dapat merespons perubahan kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat. Dalam banyak kasus, kedekatan antara pemerintah lokal dan warga menjadi alasan mengapa pelayanan tertentu bisa berjalan lebih efisien (Basri et al., 2024; Ibrahim, 2024).

Efektivitas desentralisasi juga dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya. Pemerintah daerah perlu menata penggunaan anggaran, kemampuan aparatur, dan sarana pendukung agar sesuai dengan kebutuhan layanan. Ketika pengelolaan sumber daya dilakukan dengan baik, layanan dapat berjalan lebih stabil dan mudah dijangkau masyarakat. Sebaliknya, jika pengelolaan belum optimal, layanan dapat terhambat meskipun kewenangan sudah diberikan. Dengan demikian, efektivitas desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pelimpahan kewenangan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola di masing-masing daerah (Pinargote et al., 2025; Sarwatt et al., 2025; Setiawan et al., 2022).

Dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, desentralisasi memberi kesempatan kepada daerah untuk mengatur prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Daerah yang mampu menyusun perencanaan yang jelas akan lebih mudah memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar mendukung kepentingan warganya. Perencanaan yang matang memudahkan daerah mengarahkan program layanan sehingga lebih terfokus pada hal-hal yang sering dihadapi masyarakat. Hal ini membuat desentralisasi berperan sebagai alat untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan daerah (Ain et al., 2025; Ibrahim, 2024; Popova et al., 2021).

Hubungan antara efektivitas desentralisasi dan kedekatan layanan juga terlihat dari cara pemerintah daerah menumbuhkan keterlibatan warga. Dengan komunikasi yang lebih mudah terbangun, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi atau kebutuhan secara langsung melalui mekanisme resmi yang tersedia di daerah. Situasi ini memberi keuntungan tersendiri, karena pemerintah daerah mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai pelayanan apa yang perlu ditingkatkan. Keterhubungan semacam ini memperkuat tujuan desentralisasi sebagai proses yang membawa pemerintah lebih dekat kepada Masyarakat (Be-ere, 2023; Dzakaklo et al., 2023; Laowo et al., 2024; Onyalo, 2021).

Jadi, efektivitas desentralisasi dalam mendekatkan layanan bergantung pada kemampuan daerah menjalankan kewenangan, memahami kondisi masyarakat, serta menyesuaikan pola layanan dengan kebutuhan lokal. Ketika unsur-unsur tersebut berjalan selaras, pelayanan dapat menjadi lebih mudah diakses dan lebih relevan bagi warga. Dengan demikian, desentralisasi bukan hanya pengalihan kewenangan, tetapi juga perubahan cara kerja yang memberi peluang bagi terciptanya pelayanan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih sesuai dengan karakteristik wilayah.

KESIMPULAN

Desentralisasi pada dasarnya memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan secara lebih dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan warga. Kedekatan tersebut membuat proses pelayanan menjadi lebih mudah dijangkau, sementara fleksibilitas kebijakan di tingkat lokal membantu daerah merespons situasi dengan lebih cepat. Efektivitas pelaksanaannya memang sangat bergantung pada kesiapan masing-masing daerah dalam mengelola sumber daya serta menata tata kelola pemerintahan, namun secara keseluruhan desentralisasi memberi ruang bagi terciptanya layanan yang lebih relevan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ain, Q. U., Yousaf, T., & Tahir, M. A. (2025). Decentralization policies and sustainable rural development: A path to eradicating poverty (SDG 1) and hunger (SDG 2). *Sustainable Development*, 33(1), 700–716. <https://doi.org/10.1002/sd.3147>
- Anantanatorn, A., Maskur, A., & Phuengpha, N. (2025). Decentralization and Local Governance in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Thailand and Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference on Public Administration and Governance, ICOPAG 2024, 30 October 2024, Malang, Indonesia*. Proceedings of the 3rd International Conference on Public Administration and Governance, ICOPAG 2024, 30 October 2024, Malang, Indonesia, Malang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2024.2354740>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Bano, M., & Dyonisius, D. (2022). *Community-Responsive Education Policies and the Question of Optimality: Decentralisation and District-Level Variation in Policy Adoption and Implementation in Indonesia*. Research on Improving Systems of Education (RISE). https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP_2022/108
- Basri, A. R., Silo, A., Ohoiwutun, Y., & Muhdiarta, U. (2024). Efektivitas Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura. *JURNAL EKOLOGI BIROKRASI*, 12(1), 38–60. <https://doi.org/10.31957/jeb.v12i1.3917>
- Be-ere, S. (2023). Decentralization and Pro-poor Participation in Ghana: Unmasking the Barriers to Inclusive Grassroots Development. *Studies in Comparative International Development*, 58(2), 280–307. <https://doi.org/10.1007/s12116-022-09371-y>
- Bevilacqua, C., Pizzimenti, P., Hamdy, N., & Mangiulli, F. (2022). From Deinstitutionalization to Community-Based Urban Development: Investigating Accessibility of Urban Systems in Calabria through Network Analytics. *Sustainability*, 14(3), 1348. <https://doi.org/10.3390/su14031348>
- Cilliers, J., Falla, A. M. V., Wall, G., & Barros, P. (2024). Transformative Local Governments: Addressing Social Urban Challenges by Bringing People and Politics Together. *Urban*

- Planning*, 9, 9344. <https://doi.org/10.17645/up.9344>
- Dick-Sagoe, C., Asare-Nuamah, P., & Dick-Sagoe, A. D. (2021). Public choice and decentralised healthcare service delivery in Lesotho: Assessing improvement and efficiency in service delivery. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1969737. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1969737>
- Dzakaklo, T. K., Hlovor, I. K., & Dah, F. K. (2023). Unpacking decentralization failures in promoting popular participation in the Ketu South Municipality of Ghana. *Heliyon*, 9(8), e18900. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18900>
- Elliott, F. (2023). The Advantages of Decentralized Government from the Viewpoint of Public Service Innovation. *Journal of Management and Administration Provision*, 2(3), 65–72. <https://doi.org/10.55885/jmap.v2i3.172>
- Faguet, J.-P. (2001). Does Decentralization Increase Government Responsiveness to Local Needs? Evidence from Bolivia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.260579>
- Felmingham, T., O'Halloran, S., Poorter, J., Rhook, E., Needham, C., Hayward, J., Fraser, P., Kilpatrick, S., Leahy, D., & Allender, S. (2023). Systems thinking in local government: Intervention design and adaptation in a community-based study. *Health Research Policy and Systems*, 21(1), 90. <https://doi.org/10.1186/s12961-023-01034-1>
- Grygorii Monastyrskyi. (2025). Decentralisation: Exploring Challenges, Opportunities, and Its Role in Strengthening Local Governance. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(12s), 514–523. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i12s.1860>
- Ibrahim, A. H. H. (2024). Decentralization and its impact on improving public services. *International Journal of Social Sciences*, 7(2), 45–53. <https://doi.org/10.21744/ijss.v7n2.2278>
- Laowo, D. P., Larosa, Y. M., Mendrofa, S. A., & Waruwu, S. (2024). The Role of Village Apparatus Communication in an Effort to Improve the Quality of Community Services. *Golden Ratio of Data in Summary*, 4(2), 654–671. <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.662>
- Lele, G. (2019). Asymmetric Decentralization and the Problem of Governance: The Case of Indonesia. *Asian Politics & Policy*, 11(4), 544–565. <https://doi.org/10.1111/aspp.12493>
- Mamma, B. B. (2016). Decentralization in Indonesia: An Evaluation of the Implementation of Laws 22 and 25 of 1999. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 5(2), 166. <https://doi.org/10.25077/ajis.5.2.166-177.2016>
- Nasution, A. (2017). The government decentralization program in Indonesia. In N. Yoshino & P. J. Morgan (Eds.), *Central and Local Government Relations in Asia*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781786436870.00017>
- Onyalo, P. O. (2021). Decentralised Governance in Kenya: Implications on Citizen Participation in Local Governance. *European Journal of Behavioral Sciences*, 4(4), 22–39. <https://doi.org/10.33422/ejbs.v4i4.692>
- Pinargote, J. H. L., López, T. E. H., Velasco, C. A. S., & Carrillo, C. B. Z. (2025). Decentralization and Governance in Local Governments: Challenges for Efficient Resource Management Oriented to Regional Business Development. *Journal of Posthumanism*, 5(5), 5021–5028. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i5.2084>
- Popova, S., Popova, L., Kazanchhuk, I., Bandurka, I., & Kyrieieva, I. (2021). The Role Of Local Self-Government Bodies In Prospective Areas Of Regional Development. *Studies of Applied Economics*, 39(7). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i7.5000>
- Ramadhan, A. H. R., & Yusuf, H. (2025). Implementasi Desentralisasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Pemerintahan Daerah. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 12(1), 54–66. <https://doi.org/10.37304/wacana.v12i1.20795>

- Rohim, A. (2024). Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *PATTIMURA Legal Journal*, 3(3), 178–191. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i3.16700>
- Salim, W., & Drenth, M. (2020). Local Governance and Access to Urban Services: Political and Social Inclusion in Indonesia. In S. Cheema (Ed.), *Governance for Urban Services* (pp. 153–183). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2973-3_7
- Sarwatt, A. C., Yusuf, O. M., & Charles, A. M. (2025). Effectiveness of Decentralisation by Devolution Approaches in Public healthcare services Delivery in Ilala Municipal Council and Geita Town Council, Tanzania. *Eastern African Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(1), 108–117. <https://doi.org/10.58721/eajhss.v4i1.904>
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Shoesmith, D., Franklin, N., & Hidayat, R. (2020). Decentralised Governance in Indonesia's Disadvantaged Regions: A Critique of the Underperforming Model of Local Governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(3), 359–380. <https://doi.org/10.1177/1868103420963140>
- Sudrajat, A., Mustiraya, Rd. R., & Framesthi, D. B. (2025). Effective Local Government Organizational Structure in Improving the Quality of Public Services: A Literature Study. *International Journal Administration, Business & Organization*, 6(1), 63–73. <https://doi.org/10.61242/ijabo.25.474>
- Sukodoyo, Kartika Dewi, R., Farida Sari, A., Sri Rahayu, S., & Sukarmin. (2025). Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah di Indonesia: Dampak, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 296–310. <https://doi.org/10.37567/jie.v11i1.3793>
- Suparjana & Suparjana. (2019). Decentralisation Policy to Strengthen Local Government Capacity in Sumedang Regency, West Java Province, Indonesia. *Proceedings of the International Conference of Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019)*. Proceedings of the International Conference of Democratisation in Southeast Asia (ICDeSA 2019), Serang, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.33>
- Trisakti, F., & Djajasinga, N. (2021). *Impact of Decentralization and Regional Autonomy in the Context of Improving the Quality of Public Services Towards Good Governance: 2nd Annual Conference on blended learning, educational technology and Innovation (ACBLETI 2020)*, Padang, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210615.010>